

Available online at Dakwah: Jurnal Kajian Dakwah dan Kemasyarakatan
<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/dakwah>
Dakwah: Jurnal Kajian Dakwah dan Kemasyarakatan, 27 (2), 2023, 188-209

Komunikasi Antar Kelompok Arus Utama Dan Kelompok Sempalan Mengenai Pemahaman Politik Keagamaan Perspektif Tekstualis Dan Kontekstualis

Nunung Khoiriyah
Fidkom UIN Jakarta
nunung.khoiriyah@uinjkt.ac.id

Kabir Al Fadly H
Ma'had Aly Riyadul Jannah dan STMA Trisakti Jakarta
kabir.alfadly51@gmail.com

Abstrak

Soal orientasi politik keagamaan selalu hangat dibicarakan terutama di tataran lintas organisasi keagamaan itu sendiri. Satu sisi berupa kelompok kecil seperti Khilafatul Muslimin yang sedang ramai diperbincangkan punya orientasi pemahaman politik keagamaannya sendiri yang sangat tekstual. Sementara itu, di sisi lain kelompok besar seperti Nahdhatul Ulama memahaminya secara kontekstual. Kenyataan ini menimbulkan polarisasi pandangan politik keagamaan di tengah masyarakat yang berefek domino ke berbagai masalah kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti bagaimana komunikasi antara kelompok arus utama dan sempalan mengenai pemahaman politik keagamaan, cara keduanya membaca teks-teks keagamaan, serta adakah kompromi di antara keduanya yang bisa didudukkan dan dicari jalan tengahnya melalui kacamata komunikasi dan dakwah sehingga polarisasi dapat terminimalisir serta kutub-kutub yang tegang dapat lebih mereda dan diterima dalam konteks keindonesiaan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode studi kasus dan dokumen. Teknik pengumpulan datanya berupa observasi dan studi pustaka dianalisis dalam teknik pengumpulan data berupa deskriptif analisis dengan konsep komunikasi kelompok. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk sikap tekstualis Khilafatul Muslimin tampak dari fanatisme berlebihan dengan teks sehingga pemahaman yang timbul adalah agar bagaimana teks itu dapat betul-betul mendeterminasi realitas bukan sebaliknya, soal isu khilafah misalnya yang menjadi titik berangkat dan fokusnya. Khilafatul Muslimin juga mengabaikan konteks yang terus berkembang. Sikap seperti ini belum tentu sesuai dengan konteks keindonesiaan. Sementara Nahdhatul Ulama sangat gigih merespons pemahaman-pemahaman tekstual itu dengan pendekatan kontekstual sehingga cenderung membuat teks lebih lentur dan disesuaikan dengan kondisi yang ada. Maka sebetulnya dibutuhkan tafsir jalan tengah yang ditawarkan dalam teori itu sendiri dengan prinsip tafsir semi tekstual yang dipadukan dengan konteks-realitas kekinian agar apa yang ada diteks dapat diaplikasikan pemahamannya sesuai dengan kontur tempat teks itu diaplikasikan.

Kata Kunci: Komunikasi Kelompok, Nahdhatul Ulama, Khilafatul Muslimin, Tekstualis, Kontekstualis dan Tafsir.

Permalink/DOI: <http://doi.org/10.15408/dakwah.v27i2.36706>

Communication Between Mainstream Groups and Splinter Groups Regarding Understanding of Religious Politics Textualist and Contextualist Perspectives

Nunung Khoiriyah
Fidkom UIN Jakarta
nunung.khoiriyah@uinjkt.ac.id

Kabir Al Fadly H
Ma'had Aly Riyadul Jannah dan STMA Trisakti Jakarta
kabir.alfadly51@gmail.com

Abstract

The issue of religious political orientation is always hotly discussed, especially at the cross-religious organization level itself. On the one hand, several small groups such as the Khilafatul Muslimin which are currently being widely discussed have their own orientation in understanding religious politics which is very textual. Meanwhile, on the other hand, large groups such as Nahdhatul Ulama understand it contextually. This fact gives rise to polarization of religious political views in society which has a domino effect on various problems in national and state life. This research aims to explore how communication between mainstream and splinter groups regarding understanding of religious politics, how they both read religious texts, and whether there is a compromise between the two that can be reached and a middle way can be found through the lens of communication and preaching so that polarization can be minimized. and can tense poles be more subdued and accepted in the Indonesian context. The approach used in this research is qualitative with case and document study methods. The data collection technique is in the form of observation and literature study, analyzed in the data collection technique in the form of descriptive analysis with the concept of group communication. The results of the research show that there was an initial suspicion that the textualist attitude of the Khilafatul Muslimin appeared to be excessive fanaticism with the text so that the understanding that emerged was how the text could truly determine reality, not the other way around, regarding the issue of the Khilafah, for example, which was the starting point and focus. Khilafatul Muslimin also ignores the evolving context. This kind of attitude is not necessarily appropriate to the Indonesian context. Meanwhile, Nahdhatul Ulama is very persistent in responding to these textual understandings with a contextual approach so that it tends to make the text more flexible and adapted to existing conditions. So actually a middle way interpretation is needed which is offered in the theory itself with the principles of semi-textual interpretation combined with the current context-reality so that what is in the text can be applied in understanding according to the contours of where the text is applied.

Keywords: Group Communication, Nahdhatul Ulama, Khilafatul Muslimin, Textualist, Contextualist and Tafsir.

Pendahuluan

Pascareformasi dinamika keislaman dan kelompok keislaman di Indonesia tumbuh dan berkontestasi mengambil perannya masing-masing. Tren ini terjadi sejak lama bahkan jika dirunut dalam perjalanan sejarah sejak masa pergerakan nasional masing-masing kelompok Islam mulai menunjukkan eksistensinya di berbagai sektor utamanya dalam berhadapan dengan kolonialisme. Akan tetapi perkembangan teknologi dan media akhir-akhir ini membuat tiap-tiap kelompok makin mencuat dan tersaji tanpa sekat di masyarakat pengaruhnya, seolah masyarakat disajikan dengan begitu banyak model keislaman yang dibawa sebagai jargon oleh masing-masing kelompok.

Presiden Republik Indonesia keempat KH. Abdurrahman Wahid pernah menyampaikan bahwa suatu waktu hegemoni kelompok Islam akan bergeser dari kelompok arus utama yang memiliki dominasi kuat dan anggota yang banyak menuju dominasi kelompok kecil atau sempalan, nonmainstream katakalanlah di berbagai ruang publik termasuk ruang publik baru (*new media*). Dominasi itu bahkan tembus tidak hanya soal pemikiran dan perilaku keagamaan bahkan sampai ke wacana dan ide-ide politik¹. Tren demikian lambat laun—jika kelompok mainstream atau arus utama seperti Nahdhatul ‘Ulama dan Muhammadiyah tidak mengambil ‘tindakan’— akan membuat posisi kelompok-kelompok kecil tadi semakin kuat walaupun kuantitas anggota tidak sebanyak kelompok arus utama. Sebab kegigihan dan gerakan yang masif opini utama masyarakat baik nyata dan maya akan dengan mudahnya dibawa dan digiring oleh kelompok kecil ini.

Jangan sampai peran-peran

penting di tingkat kebangsaan diambil alih oleh kelompok demikian yang secara ideologis—beberapa kelompok— membawa haluan baru di luar kesepakatan para pendiri bangsa. Sebab gerakan masif kelompok-kelompok tersebut intens masuk terutama dari pintu pendidikan dan dakwah. Banyak lembaga-lembaga pendidikan dan pengajian yang kini afiliasinya mengarah pada pemahaman yang dibawa kelompok-kelompok tersebut. Kelompok-kelompok tersebut membawa jiwa militansi yang kuat dan ulet terutama dalam melebarkan kepek keprahnya untuk mengejar apa-apa yang menjadi cita-cita mereka.² Sekali lagi jika kelompok arus utama militansinya melemah maka tidak bisa dipungkiri, ke depan pergeseran akan terjadi, kelompok arus utama bisa menciut menjadi kelompok sempalan dan kelompok-kelompok sempalan tersebut akan tumbuh besar menjadi kelompok arus utama.

Baru-baru ini yang paling hangat adalah soal kelompok sempalan Khilafatul Muslimin yang memang keberadaannya sudah eksis beberapa belas tahun ke belakang, namun muncul kembali perbincangannya belakangan ini. Bermula dari konvoi Khilafatul Muslimin di Jakarta yang membawa motto Penegak *Khilafah ‘ala Manhajjinnubuwah* yang bermuara pada penangkapan beberapa petingginya termasuk Khalifah atau Amir tertingginya Abdul Qodir Hasan Baraja yang ditangkap di Lampung dan pentolan lainnya di beberapa daerah seperti Medan dan Bekasi.³

Lantas kemudian publik dan masyarakat kembali bertanya seberapa bahaya dan gerakan serta paham apa yang dibawa oleh gerakan seperti Khilafatul muslimin sehingga seluruh petingginya diburu, sementara gerakan

ini sudah ada semenjak beberapa tahun yang lalu. Belum lagi kelompok-kelompok lainnya yang masih massif menyuarakan ideologinya walaupun secara formatif dan kelembagaan telah dibekukan oleh pemerintah seperti Hizbut Tahrir Indonesia dan kelompok lainnya. Makalah ini akan coba mengurai pemahaman politik keagamaan kelompok sempalan yang diwakili oleh Khilafatul Muslimin untuk kemudian dibandingkan dengan pemahaman keagamaan kelompok arus utama dalam hal ini diwakili oleh Nahdhatul Ulama dalam bingkai komunikasi kelompok dan dalam perspektif tektualis dan kontekstualis.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengkaji, mendeskripsikan, menginterpretasi dan menganalisis data menggunakan deskriptif analisis berupa studi kasus untuk menjawab rumusan masalah penelitian, ditambah juga dengan berbagai bahan kepustakaan dan dokumen terutama terkait pemikiran keagamaan Khilafatul Muslimin dan Nahdhatul Ulama dengan bedahan dari teori tekstualis maupun kontekstualis. Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah konstruktivis, yaitu cara pandang yang menyatakan bahwa individu menginterpretasikan dan beraksi menurut kategori konseptual dan pikiran. Realitas tidak menggambarkan diri individu namun harus disaring melalui cara pandang orang terhadap realitas tersebut.⁴

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu sebuah metode yang mengungkapkan masalah dengan cara menggambarkan dan memaparkan apa adanya sesuai dengan keadaan yang diteliti.⁵ Artinya berusaha dijelaskan dan

digambarkan segala sesuatu yang ditemui dan terjadi di lapangan untuk nantinya dianalisis sesuai metodologi yang ada dan menjawab tujuan penelitian. Metode studi kasus menjadi pilihan untuk mempertajam penelitian ini, studi kasus bertujuan untuk menjelaskan dan memahami objek yang diteliti secara mendalam sebagai suatu kasus. Selanjutnya metode ini tidak hanya menggambarkan seperti apa kasus tersebut namun lebih dari itu juga menjelaskan bagaimana keberadaan dan kasus tersebut dapat terjadi.⁶

Dinamika Komunikasi Antarkelompok

Hidup sebagai kelompok merupakan naluri manusia sejak lahir yang selalu mendorong dirinya untuk menyatukan hidup dengan orang lain lalu menyatukan kelompoknya atau dirinya tadi dengan kelompok yang lebih besar lagi. Setelahnya bahkan, manusia juga terdorong untuk menyatukan dirinya dengan alam fisik yang berada di sekitarnya. Untuk memenuhi kebutuhan naluriah tadi manusia melakukan proses melibatkan diri yang kemudian disebut sebagai adaptasi sehingga lahir struktur sosial baru yang disebut sebagai kelompok atau kelompok sosial. Kelompok sosial adalah kehidupan bersama manusia dalam himpunan atau kesatuan manusia-manusia yang punya batasan lokal sendiri dan hidup secara guyub bahkan banyak yang bentuknya formal dan terdiri atas aturan-aturan jelas yang pada gilirannya disebut kelompok formal.⁷

Beberapa yang lain menyebut kelompok sebagai orang yang mempunyai tujuan bersama yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, mengenal

satu dengan yang lain dan memandang mereka sebagai satu kesatuan dalam kelompok tersebut. Sebagai contoh kelompok keluarga yang paling kecil hingga kelompok organisasi yang besar.⁸ Sementara komunikasi kelompok sendiri atau group communication berarti komunikasi yang berlangsung antara seorang komunikator atau di atas itu dengan sekelompok orang yang jumlahnya lebih dari dua orang.

Komunikasi kelompok terdiri atas dua kata komunikasi dan kelompok, komunikasi dalam Bahasa Inggris communication berasal dari kata latin communicatio dan bersumber dari kata communis yang berarti sama, yakni maksudnya menyamakan suatu makna. Lebih sederhana terkadang didefinisikan sebagai sama makna atau sebuah makna yang dapat dipahami bersama. Sedangkan kelompok kelompok dapat dipandang dari segi persepsi, motivasi, dan tujuan, interdependensi dan juga dari segi interaksi. Berarti komunikasi kelompok adalah menyamakan suatu makna didalam suatu kelompok. Pengertian kelompok berdasarkan di atas dapat diartikan atas beberapa dasar yakni, motivasi, dasar tujuan, saling ketergantungan dan interaksi.⁹

Perihal pentingnya manusia hidup dengan berkelompok atau minimal mengandalkan dan butuh terhadap peran orang lain banyak dijelaskan oleh para ahli. Spinoza misalnya, jauh-jauh dahulu pernah Ia sampaikan bahwa manusia adalah binatang sosial yang diterjemahkan oleh para ahli modern sebagai tanda bahwa orang lain begitu punya pengaruh kuat dan besar terhadap perilaku, sikap bahkan persepsi kita.¹⁰ Artinya bahwa berkelompok adalah kebutuhan manusia untuk dapat terus melanjutkan kehidupannya, dan tidak

bisa manusia melangsungkan kehidupannya tanpa berkelompok. Irisannya dengan komunikasi bahwa, komunikasi kemudian bisa menjadi benang yang bisa merajut keperluan masing-masing anggota kelompok tadi untuk dapat terus mempertahankan diri dan kelompoknya, maka di sinilah komunikasi punya peran penting soal itu.

Hal yang penting dalam kelompok bukanlah terletak pada seberapa sering anggota kelompok mengatakan atau menyampaikans sesuatu akan tetapi bagaimana ketersalingan respon dan anggapan di antara anggota kelompok menjadi hidup. Kelompok juga tidak bisa mengisolasi dirinya sendiri sebab merupakan bagian dari sistem yang lebih besar. Anggota kelompok dapat datang silih berganti, bahkan orang dapat menjadi bagian anggota (afiliasi) dari beberapa kelompok. Lingkungan juga terus berubah dan kelompok harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan. Afiliasi satu anggota dengan kelompok lain dapat memengaruhi suasana komunikasi dan dinamika di kelompok tersebut, demikian pula keluar masuk anggota akan memengaruhi dinamika peran yang terjadi dalam kelompok tadi.¹¹ Sekali lagi, komunikasi dapat mengambil peran yang baik untuk menyelaraskan dinamika yang terjadi di kelompok agar tujuan-tujuan yang diniatkan dan disepakati bersama oleh kelompok dapat terwujud.

Selanjutnya dalam perkembangan kelompok ada 4 Tahap Perkembangan Suatu Kelompok, yakni:

1. Forming adalah tahapan yang para anggota mulai menempatkan diri berhubungan secara interpersonal, mereka saling memperhatikan, bersahabat, dan mencoba melihat

manfaat serta biaya menjadi anggota kelompok.

2. Storming, tahap ini mulai banyak kegiatan dan pembentukan norma, konflik mulaiterjadi karena masalah keppemiminan, tujuan, norma atau perilaku interpersonal, namun konflik belum tentu terjadi manakala kelompok dapat bekerja efektif dan mampu mengatasi problem.
3. Norming, tahap ketiga ini anggota kelompok belajar bekerjasama, mengembangkan norma dan kekompakan. Kerjasama dan rasa tanggung jawab berkembang pada tahap ini.
4. Tahap, terakhir adalah performing, tahap ini kerjasama yang efektif dalam menjalankan tugas. Dari tahap ini beberapa keolmpok dapat terus berkembang, adapula yang kemudian mengalami kemunduran.¹²

Tahapan-tahapan inilah yang nanti akan dijadikan bahasan kemudian dalam menilai sikap pemahaman politik keagamaan dua kelompok yang akan dibahas dalam makalah ini. Untuk teori, yang digunakan adalah turunan dari Komunikasi Antaragama dan Budaya yang dicetuskan oleh Andi Faisal Bhakti, akan tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa Khilafatul Muslimin sebagai kelompok dan Nahdhatul 'Ulama juga sebagai kelompok, —peneliti anggap— membutuhkan sebuah konsep yang dapat menjelaskan dinamika komunikasi yang terjadi baik di dalam masing-masing kelompok maupun antarkelompok tersebut. Sehingga didapatkan data yang lebih shopisticated dalam menjawab problema yang ada.

Arus Utama dan Sempalan, dari Nahdhatul 'Ulama sampai Khilafatul Muslimin

Kelompok Islam sempalan (splinter) atau terkadang juga disebut sebagai kelompok nonmainstream, menjadi entitas baru yang mewarnai bingkai keislaman di Indonesia, bahkan menjadi corak baru yang tidak lagi bergerak di bawah tanah tetapi justru menunjukkan wajah baru yang terang-terangan dan frontal. Oleh karena itu, Greetz menyampaikan Islam tidak lagi hanya direpresentasikan oleh santri, priyayi dan abangan. Peta Islam Indonesia juga bukan lagi hanya menampakkan beragam kantong yang menampilkan watak dasar moderat. Kantong-kantong yang mengutamakan spirit toleransi dan lokalitas.¹³ Akan tetapi kebalikan dari itu semua, warna Islam Indonesia saat ini memiliki cukup banyak varian atau kental dengan berbagai ragam corak dan visinya baik yang masih sejalan dengan cita-cita luhur bangsa maupun kelompok-kelompok yang punya agenda tertentu dalam peranannya.

Kelompok Islam arus utama yang disebut-sebut sebagai kelompok mainstream atau spirit Islam Moderat, dalam bilangan tertentu masih cukup survive dan menjadi bagian penting dari warna Islam Indonesia. Beberapa dapat disebut, misalnya, Nahdhatul 'Ulama, Muhammadiyah, Al-Washliyah, Mathla'ul Anwar, Nahdlatul Wathan dan seterusnya.¹⁴ Bersamaan dengan itu gerakan Islam baru yang berwajah dan membawa paham transnasional juga turut mewarnai. Sebut saja mislanya, Jama'ah Tabligh Indonesia (JTI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Jama'ah Ahmadiyah Indonesia (JAI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Fron Pembela Islam (FPI) dan termasuk di

dalamnya Khilafatul Muslimin (KM). Masing-masing dari dua kutub itu, dengan derajat berbeda, cukup ekspansif, terlebih mereka yang masih dalam kutub sempalan. Perbedaan cara pandang, pengalaman pemahaman politik keagamaan dan bahkan respon atas politik kebangsaan begitu kental mewarnai kedua kutub Islam Indonesia, selama ekspansi diberlakukan oleh masing-masing kutub Islam tersebut. Tak urung, gesekan-gesekan dan bahkan konflik dalam skala kecil terjadi, antara Islam sempalan. Tidak hanya itu, konflik dalam skala arus utama begitu ekstensi dan ekspansif. Sementara Islamisasi dipahami kutub Islam arus utama sebagai bagian dari penggerusan terhadap umat yang sebelumnya berada di dalam otoritas mereka.¹⁵ Ini sebuah dilema berkepanjangan yang pada akhirnya akan memberikan banyak pengaruh kurang mengenakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, jika tidak ada solusi yang ditawarkan dan dikedepankan tentunya.

Perihal Nahdhatul 'Ulama sendiri, dahulu pada masa pergerakan nasional kalangan pesantren gigih melawan kolonialisme dengan membentuk organisasi pergerakan, seperti Nahdlatul Wathan (Kebangkitan Tanah Air) pada tahun 1916. Kemudian tahun 1918 didirikan Taswirul Afkar atau dikenal juga dengan Nahdhatul Fikri (Kebangkitan Pemikiran), sebagai wahana pendidikan sosial politik kaum dan keagamaan kaum santri. Selanjutnya didirikanlah Nahdhatut Tujjar (Pergerakan Kaum Sudagar) yang dijadikan basis untuk memperbaiki perekonomian rakyat. Dengan adanya Nahdhatut Tujjar itu, maka Taswirul Afkar, selain tampil sebagai kelompok studi juga menjadi lembaga pendidikan yang berkembang

sangat pesat dan memiliki cabang di beberapa kota.

Ketika Raja Ibnu Saud hendak menerapkan asas tunggal yakni mazhab Wahabi di Mekah, serta hendak menghancurkan semua peninggalan sejarah Islam maupun praIslam, yang selama ini banyak diziarahi karena dianggap bid'ah. Gagasan kaum Wahabi tersebut mendapat sambutan hangat dari kaum modernis di Indonesia, baik kalangan Muhammadiyah di bawah pimpinan KH. Ahmad Dahlan, maupun Partai Serikat Islam Indonesia atau PSII di bawah pimpinan H.O.S. Tjokroaminoto. Sebaliknya, kalangan pesantren yang selama ini membela keberagaman, menolak pembatasan bermadzhab dan penghancuran warisan peradaban tersebut.

Sikapnya yang berbeda, kalangan pesantren dikeluarkan dari anggota Kongres Al-Islam di Yogyakarta 1925, akibatnya kalangan pesantren juga tidak dilibatkan sebagai delegasi dalam Mu'tamar 'Alam Islami (Kongres Islam Internasional) di Mekah yang akan mengesahkan keputusan tersebut. Didorong oleh minatnya yang gigih untuk menciptakan kebebasan bermazhab serta peduli terhadap pelestarian warisan peradaban, maka kalangan pesantren terpaksa membuat delegasi sendiri yang dinamai dengan Komite Hijaz, yang diketuai oleh KH. Wahab Hasbullah. Atas desakan kalangan pesantren yang terhimpun dalam Komite Hijaz, dan tantangan dari segala penjuru umat Islam di dunia, Raja Ibnu Saud mengurungkan niatnya. Hasilnya hingga saat ini di Mekah bebas dilaksanakan ibadah sesuai dengan mazhab mereka masing-masing. Itulah peran internasional kalangan pesantren pertama, yang berhasil memperjuangkan kebebasan bermazhab dan berhasil

menyelamatkan peninggalan sejarah serta peradaban yang sangat berharga.

Berangkat dari komite dan berbagai organisasi yang bersifat embrional dan ad hoc, maka setelah itu dirasa perlu untuk membentuk organisasi yang lebih mencakup dan lebih sistematis, untuk mengantisipasi perkembangan zaman. Maka setelah berkordinasi dengan berbagai kiai, akhirnya muncul kesepakatan untuk membentuk organisasi yang bernama Nahdhatul Ulama (Kebangkitan Ulama) pada 16 Rajab 1344 H (31 Januari 1926). Organisasi ini dipimpin oleh KH. Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar. Untuk menegaskan prinsip dasar organisasi ini, maka KH. Hasyim Asy'ari merumuskan Kitab Qanun Asasi (prinsip dasar), kemudian juga merumuskan kitab I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Kedua kitab tersebut kemudian diejawantahkan dalam Khittah NU, yang dijadikan dasar dan rujukan warga NU dalam berpikir dan bertindak dalam bidang sosial, keagamaan dan politik.¹⁶ Nahdhatul Ulama sebagai organisasi keagamaan (Jam'iyah Islamiyah) terbesar dalam jumlah anggotanya di Indonesia bahkan dunia menyatakan diri sebagai organisasi yang berhaluan Ahlussunnah wal Jama'ah yang dalam akidah mengikuti aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah, dalam fikih berkiblat kepada salah satu dari mazhab yang empat dan dalam tasawuf berpegang kepada Imam al-Junaid dan Imam al-Ghazali. Selain itu dalam Mukhtamar NU 1984 dirumuskan watak dan karakter NU sebagai komunitas jama'ah dan sebagai organisasi atau jam'iyah dengan sikap kemasyarakatan dan budaya (socio-kultural) dengan prinsip Tasamuh, Tawasuth dan Tawazun. Adapun kepemimpinan NU diserahkan kepada para Ulama yang

dinilai punya kompetensi tinggi dalam kepemimpinan ilmiah, sosial, spiritual hingga administratif. Organisasi NU juga peduli terhadap kehidupan (politik) bangsa dan negara yang manifestasinya nyata dari dulu hingga kini seperti gerakan perebutan kemerdekaan, gerakan kebangsaan, pemerintahan, aktivitas politik praktis hingga memengaruhi warna politik Indonesia hingga kini. Itu semua tidak lepas dari tujuan dasar NU didirikan sebagai maslahat untuk segenap masyarakat bangsa sesuai dengan nilai teologis dan spiritualis yang diyakini NU juga termasuk di dalamnya Khittah NU.¹⁷

Adapun Khilafatul Muslimin, sebagaimana organisasi keagamaan pada umumnya, KM adalah organisasi yang hadir dengan dilatarbelakangi —n pemahaman para pendirinya— soal kemunduran umat Islam di berbagai lini kehidupan terutama kelemahan dalam bidang politik dan ekonomi yang telah habis didominasi Barat. Belum lagi tingkatkesenjangan sosial di masyarakat yang sangat tinggi menyebabkan berbagai masalah sosial lainnya yang berbahaya dan mengganggu stabilitas sosial.

Semua problematika itu semua menjadi cermin betapa rapuhnya benteng umat Islam menghadapi hempasan budaya dan pemikiran yang dibawa negara-negara Barat dan segenap agen-agennya dari kalangan penguasa yang zalim, yang amat jauh dari sistem keislaman yang selama ini diimpikan.¹⁸ Secara hitungan saja umat Islam yang jumlahnya lebih dari 1,5 miliar tak ubahnya bagai lautan buih yang tidak memiliki kekuatan apapun. Realitas demikian sungguh bertolak belakang 180 derajat dengan kejayaan umat Islam pada periode Daulah Khilafah Islamiyah yang berdiri tegak

selama 1000 tahun lebih. Jelaslah, tanpa Khilafah Islamiyah umat Islam akan hidup dalam tempurung keterpurukan dan keterbelakangan. Mereka terpecah belah menjadi puluhan negara, kekayaannya dirampok dan diangkut ke luar negerinya, kesewenangan negara-negara imperialis Barat tak mampu dilawan, hukum-hukum kafir ditegakkan dengan leluasa dan manusia semakin jauh dari fitrah kemanusiannya. Sementara itu hukum-hukum Allah Ta'ala yang adil, agung dan tinggi teronggok secara nista hanya dalam kitab-kitab fikih yang usang dan berdebu. Kalaupun dikaji, hukum-hukum yang mulia itu hanya sekedar menjadi pengetahuan dan konsumsi otak belaka, jauh dari penerapannya dalam kehidupan nyata.

Karena itu, ketiadaan khilafah ini harus diakhiri dengan jalan menegakkan kembali Khilafah Islamiyah yang akan menerapkan kembali syariat Islam secara total. Hal itu merupakan keniscayaan untuk mengakhiri berbagai problem dan keburukan yang diderita umat saat ini dan untuk mengembalikan kejayaan dan kemuliaan ke tangan umat Islam. Penegakkan Khilafah Islamiyah juga menjadi tuntutan dari kondisi faktual dunia. Ideologi dan sistem sosialisme komunisme telah tumbang dan ditinggalkan oleh umat manusia karena telah terbukti cacat, rusak dan buruk bagi umat manusia. Sementara ideologi dan sistem kapitalisme yang mendominasi dunia saat ini, tengah kacau didera berbagai krisis yang susul menyusul dan tak kunjung usai, bahkan makin hari makin besar dan makin parah. Kapitalisme tidak lagi bisa memberikan solusi dan harapan bagi umat manusia. Satu-satunya harapan bagi penyelesaian problem dunia, tidak

ada lagi selain penerapan Syariat Islam dalam sistem Khilafah Islamiyah.

Dalam pemahaman KM umat Islam harus memiliki seorang pemimpin utama yang bertugas untuk menjalankan sebuah agenda besar dalam menegakkan Syariat Islam di seluruh dunia sebagai prasyarat dalam mewujudkan masya-rakat yang sejahtera. Dalam tataran kehidupan ini, sumber utama yang menjadi rujukan dalam kehidupan adalah Al- Qur'an. Setelah itu adalah as-Sunnah. Karena itu, jika seseorang telah mengakui filsafat hidup yang ditetapkan oleh Allah dan RasulNya sebagai perwujudan dari realitas, maka tidak ada satu pun justifikasi yang bisa dibenarkan sebagai alasan untuk tidak mentaati tuntutan Tuhan bahkan pada bidang-bidang yang menjadi pilihan bebasnya sendiri sekalipun.

Bagi jamaah KM, kekhalifahan Islam adalah rumah besar untuk mewedahi implementasi penegakkan Syariat Islam, mutiara yang hilang, yang harus ditegakkan kembali. KM menghendaki terbentuknya Daulah Islamiyah yang memiliki tokoh pemimpin atau khalifah yang dapat dipercaya untuk memimpin kaum muslimin di seluruh dunia. Makna yang tersirat dari ide di atas adalah terwujudnya persatuan kaum Muslimin sedunia di bawah panji-panji kekhalifahan sebagaimana yang pernah terjadi pada masa Khulafaurrasyyidin dan masa-masa setelahnya. Keyakinan yang demikian dijustifikasi dengan asumsi hukum keagamaan dalam berbagai literatur hadits yang dipahami dengan ideologi dan pemahaman secara tekstual.¹⁹

Setelah mengalami kekosongan kekuasaan pascaruntuhnya Kesultanan Turki Utsmani selama lebih dari 76 tahun tanpa kepemimpinan Islam,

akhirnya Ustaz Abdul Qadir Hasan Baraja dari Indonesia yang menyusun dan menyampaikan maklumat tentang berdirinya kekhilafahan Islam yang disebut dengan konsep “Maklumat Khilafatul Muslimin” pada tanggal 13 Rabiul Awwal 1418 H/18 Juli 1997 dengan Lampung sebagai pusat pemerintahan. Konsep maklumat yang disusun oleh Ustaz Abdul Qadir Hasan Baraja ini merupakan akumulasi dari berbagai mimpi dan hasil perenungan selama Beliau menghuni Lembaga Pemasarakatan Kali Sosok Surabaya Jawa Timur sebagai tahanan politik oleh karena keterlibatannya dalam gerakan Negara Islam Indonesia (NII).

KM merupakan sebuah gerakan yang lahir dari ide Pan Islamisme yang tidak dapat diwujudkan melalui gerakan Negara Islam Indonesia (NII) yang telah diploklamirkan sebelumnya. Sehingga apabila ditelusuri dari sejarah lahirnya, maka dapat ditemukan benang merah antara KM dengan Negera Islam Indonesia (NII) yang pernah dideklarasikan oleh Kartosuwiryo di Jawa Barat, yang kandas karena penolakan serta reaksi keras dari rakyat dan pemerintah Indonesia pada saat itu. Akibatnya tokoh-tokoh NII yang masih tersisa pada masa itu memilih bergerak ke berbagai daerah dan negara untuk melanjutkan perjuangan tersebut. Di antara tokoh NII yang memilih hijrah adalah Ustaz Abubakar Ba'asyir dan Ustaz Abdullah Sungkar yang menjadikan Malaysia sebagai negara tujuan.

Selanjutnya, ide dasar menegakkan dan menerapkan syariat Islam kemudian berubah dari konteks lokal menuju konteks global. Gerakan yang pada mulanya hanya terbatas pada konteks keindonesiaan, kemudian diperluas menjadi konteks dunia

dengan asumsi bahwa Islam merupakan ajaran yang bersifat universal bagi segenap manusia, maka kekhilafahan tidak terbatas pada kaum muslimin yang ada di Indonesia saja. Dalam perkembangannya, meskipun tokoh-tokoh NII banyak yang membidani lahirnya KM, namun pendekatan yang digunakan dalam menerapkan syariat Islam kini berbeda, yakni tidak menggunakan pendekatan kekerasan maupun militeristik sebagaimana yang pernah terjadi pada masa lampau. Gerakan ini lebih banyak menekankan pada pendekatan membangun kesadaran dan penajaman pemahaman umat mengenai pentingnya khilafah dalam kehidupan setiap seorang Muslim. Sebab tidak sempurna keIslaman seseorang sampai dia bergabung pada kekhilafahan dan mempunyai pemimpin dalam perspektif Islam dengan sistem Islam, menurut mereka, tentunya.

Sebelumnya posisi khalifah atau amirul mukminin ini telah ditawarkan kepada beberapa orang ulama yang mujahid, baik dalam maupun luar negeri, agar bersedia dipilih sehingga umat memiliki seorang khalifah untuk ditaati dalam kehidupan. Namun sepanjang masa penawaran tersebut, tidak ada seorangpun tokoh yang bersedia untuk dipilih sehingga para sahabat Ustaz Abdul Qadir Hasan Baraja mengembalikan maklumat tersebut kepada pencetus awalnya, yakni beliau sendiri dengan sebuah catatan penting bahwa, “yang paling paham dengan maklumat tersebut tentu saja adalah pencetusnya sendiri dan dialah yang paling bertanggungjawab dengan posisi khalifah untuk menjadi bagian dari maklumat.” Kini, KM telah menjelma sebagai sebuah gerakan dakwah dan pendidikan yang menekankan pada

pentingnya kembali pada nilai-nilai historis Islam yang sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah. Dan dalam perkembangannya, kini KM telah merambah dan menyebar di berbagai daerah dan Kota di Indonesia dan telah menjelma sebagai organisasi yang telah memiliki banyak pengikut yang tersebar di berbagai kecamatan dan desa.

Berdirinya KM merupakan sebuah ikhtiar dari para pendirinya terutama Ustaz Abdul Qadir Hasan Baraja untuk menerapkan keyakinan tersebut dalam bentuk formal sebuah pemerintahan Islam. Namun pemerintahan yang dimaksud adalah pemerintah yang diangkat dan dipilih melalui musyawarah kaum muslimin dengan mengedepankan semangat kebersamaan. Namun demikian perlu dipahami bahwa meskipun KM dalam penyelenggaraan kehidupannya memiliki konsep kenegaraan, bukan berarti membentuk lembaga pemerintahan seperti konsep negara modern yang kita kenal. Pelembagaan tersebut adalah bersifat pelembagaan jamaah dalam satu kesatuan yang terstruktur secara sistematis sehingga memudahkan dalam pembinaan dan koordinasi guna mencapai kemaslahatan umat. Pembentukan khilafah tidak dimaksudkan untuk membentuk negara dalam Negara. Artinya, eksistensi khilafah tidak akan mengganggu keutuhan dan kedaulatan NKRI. Ini sejalan dengan realitas bahwa dalam tubuh KM tidak terdapat sebuah mekanisme kerja pemerintahan yang bersifat kompleks dan rumit seperti halnya konsep dan sistem dalam sebuah ketatanegaraan dan pemerintahan modern seperti yang kita kenal sekarang ini.

Eksistensi KM sejalan dengan pandangan Muhammad Abid al-Jabiri

yang merangkum dalam tiga unsur pokok, yakni: pertama, memilih calon pemimpin yang akan disertai tanggungjawab untuk mengurus hajat hidup kaum muslimin. Kedua, khalifah yang diangkat adalah seseorang yang berkuasa atas semua wilayah kaum muslimin. Ketiga, diangkat berdasarkan pilihan kaum muslimin. Maka Khilafah dibentuk sebagai wadah bersatunya kaum muslimin yang bersifat universal dan tidak dibatasi oleh wilayah teritorial, sedangkan negara adalah sistem pemerintahan yang tidak bersifat universal dan dibatasi oleh daerah teritorial.¹⁵

Secara organisatoris, mekanisme kerja dalam struktur birokrasi Khilafatul Muslimin hampir mirip dengan sistem kerja negara yang sesungguhnya, masing-masing mengemban tugas dan kewajiban untuk mengurus segenap urusan kaum muslimin yang berada pada wilayah masing-masing. Bahkan KM memiliki strata kewilayahannya sendiri seperti kekhilafahan yang menaungi umat Islam sedunia, daulah yang menaungi jamaah dengan terdiri dari beberapa wilayah, wilayah terdiri dari beberapa ummul quro, ummul quro terdiri dari beberapa kemas'ulan dan kemas'ulan yang terdiri dari beberapa keluarga.²⁰ Sisi lain yang cukup mencengangkan juga misalnya bahwa 14.000 anggota KM punya kartu pengenal kependudukans sendiri, seperti KTP (Kartu Tanda Penduduk). Ini berasal dari berbagai daerah disertai dengan nomer induk warga yang terdiri di berbagai sector pekerjaan mulai dari pengusaha, Aparatur Sipil Negara, petani, dokter, karyawan dan lainnya. Selain kartu tanda pengenal ini warga KM juga dibekali semacam buku pegangan berisi latar belakang dan haluan umum organisasi KM sendiri,

tentu setelah sebelumnya melaksanakan baiat kepada amir atau pihak yang ditunjuk amir.²¹ Artinya gerakan tersebut tidak main-main dan bukan hanya bergulat dalam tataran teori maupun bawah tanah. Implementasi cita-cita luhur mendirikan negara beserta atributnya mulai gencar dilakukan oleh KM sebagai ikhtiar mereka.

Prinsip-prinsip Pemikiran Politik Keagamaan Nahdhatul Ulama dan Khilafatul Muslimin

Ahlussunnah wal Jama'ah yang dikembangkan oleh NU memiliki prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan bagi tingkah laku sosial dan pemahaman keagamaan kalangan NU. Prinsip dasar itu bersumber dari Al-Qur'an, sunnah, ijma' dan qiyas ini telah menjadi paradigma sosial-kemasyarakatan warga NU yang terus dikembangkan sesuai dengan konteks perkembangan masyarakat Islam dan pemikiran selama ini. Ada beberapa prinsip-prinsip dasar politik keagamaan dalam NU, antara lain, pertama, prinsip tawassut (moderat), tidak ekstrem kanan atau kiri. Dalam paham Ahlussunnah wal Jama'ah, baik di bidang hukum (syariat) bidang akidah, maupun bidang akhlak, selalu dikedepankan prinsip tengah-tengah, sering juga dikemukakan konsep lain yang beririsan yakni i'tidal atau tengah-tengah, bersikap adil tidak ke kanan dan ke kiri. Seperti pengertian tadi juga di bidang kemasyarakatan selalu menempatkan diri pada prinsip hidup menjunjung tinggi keharusan berlaku adil, lurus di tengah-tengah kehidupan bersama, sehingga ia menjadi panutan dan menghindari segala bentuk pendekatan ekstrem. Sikap moderasi ini, tercermin pada metode pengambilan hukum (istinbat) yang

tidak semata-mata menggunakan nash, namun juga memperhatikan posisi akal. Akal mempunyai proporsi yang sama dengan nash dalam menentukan atau menetapkan suatu hukum. Begitu pula dalam berfikir selalu menjembatani antara wahyu dengan rasio (ar-ra'y). Metode (manhaj) seperti inilah yang diimplementasikan oleh imam mazhab empat serta generasi berikutnya dalam menelorkan hukum-hukum. Moderat adalah menengahi antara dua pikiran yang ekstrem, antara Qadariyah (free-willism) dan Jabariyah (fatalisme), ortodoks salaf dan rasionalisme Mu'tazilah, dan antara sufisme falsafi dan sufisme salafi. Kedua, prinsip tawazun, yakni menjaga keseimbangan dan keselarasan, sehingga terpelihara secara seimbang antara kepentingan dunia dan akhirat, kepentingan pribadi dan masyarakat, dan kepentingan masa kini dan masa yang akan datang. Pola ini dibangun lebih banyak untuk persoalan-persoalan yang berdimensi sosial-politik. Dalam bahasa lain, melalui pola ini Ahlussunnah wal Jama'ah ingin menciptakan integritas dan solidaritas sosial umat yang kerap terjadi perselisihan sehingga timbul perpecahan yang akan merusak keharmonisan umat.

Dalam kancah politik Ahlussunnah wal Jama'ah tidak selalu membenarkan kelompok garis keras (ekstrim). Akan tetapi, jika berhadapan dengan penguasa yang zalim, mereka tidak segan-segan mengambil jarak dan mengadakan aliansi. Jadi, suatu saat mereka bisa akomodatif, disaat yang lain bisa lebih dari itu meskipun masih dalam batas tawazun. Ketiga, prinsip tasamuh, yaitu bersikap toleran terhadap perbedaan pandangan, terutama dalam hal-hal yang bersifat furu'iyah, sehingga tidak terjadi perasaan saling terganggu, saling

memusuhi, saling menonjolkan ego masing-masing dan sebaliknya akan tercipta persaudaraan yang Islami (ukhuwwah Islamiyyah). Keempat, prinsip amar makruf nahi mungkar (menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran). Mencegah untuk berbuat mungkar merupakan titik tekan awal yang harus tertanam dalam masing-masing individu sehingga tercipta perbuatan yang baik. Dengan prinsip ini, akan timbul kepekaan dan mendorong perbuatan yang baik dalam kehidupan bersama serta kepekaan menolak dan mencegah semua hal yang dapat menjerumuskan kehidupan ke lembah kemungkaran. Apabila dari empat prinsip ini diperhatikan secara seksama, maka dapat dilihat bahwa ciri dan substansi ajaran Ahlussunnah wal Jama'ah adalah sebagai pembawa rahmat untuk seluruh alam (rahmatan lil alamin).²²

Pemikiran politik keagamaan yang mencolok dalam Khilafatul Muslimin salah satunya menyoroti problem mendasar yang terdapat dalam penentangannya terhadap demokrasi, sebab demokrasi mengakui adanya kedaulatan di tangan rakyat. Ini adalah sesuatu yang secara jelas berhadapan dengan Islam. Dalam Islam, kedaulatan (souverenitas) ada di tangan Tuhan, bukan manusia. Al-Quran menunjukkan bahwa otoritas serta kedaulatan tertinggi ada di tangan Allah, yang bermakna pula bahwa Tuhanlah yang berhak memberikan hukum bagi manusia. Manusia tidak memiliki hak untuk menyusun hukum. Salah satu amirnya menyatakan bahwa konsep khilafah Islamiyah tidaklah sama dengan konsep negara Islam. Sebab, negara Islam dibatasi oleh geografis tertentu, sementara kekhilafahan berlaku secara universal mendunia tanpa sekat-sekat geografis,

budaya, suku dan sebagainya. Selain itu, belajar dari strategi dakwah Rasulullah, dakwah Islam tidaklah dimulai dari negara, melainkan dari orang per-orang. Kepemimpinan itu diawali dengan apa yang sering disebut sebagai taklif qulub atau merebut dan menyatukan hati masyarakat untuk menerima Islam, bukan dengan taklif quwwah atau merebut kekuasaan. Dari situ kemudian Rasulullah lantas melakukan baiat atau sumpah setia orang-orang yang sudah beriman, dan mewajibkan atas mereka ketaatan terhadap ajaran Islam. Dari situlah komunitas serta kesatuan umat Islam akan dengan sendirinya terbentuk. Sebuah kesatuan umat yang tidak dibatasi oleh territorial geografis, negara, bangsa ataupun ras tertentu. Tetapi, komunitas yang melampaui itu semua berdasarkan kesamaan, kesatuan iman yang membentuk umat.

Dalam konstitusinya, dijelaskan bahwa KM ini berasaskan Islam dan kemerdekaan, bertujuan memakmurkan bumi dan menyejahterakan umat melalui pelaksanaan ajaran Allah dan Rasulnya bersama kebebasan penerapan ajaran semua agama sebagai prinsip dasar jamaah tanpa memperkenankan seorang warganya membuat aturan, ketentuan, norma-norma yang bertentangan dengan ajaran agamanya sendiri. Selain itu, Jamaah KM ini akan menyelesaikan suatu perkara atau urusan yang menyangkut kepentingan umat melalui musyawarah kekhilafahan secara transparan, penuh keterbukaan dan kebebasan berlandaskan akhlaq al-karimah. KM juga akan senantiasa berusaha maksimal untuk mewujudkan kerja sama antar umat manusia sesuai ajaran demi keadilan dan kesejahteraan mereka serta kelestarian alam semesta atau rahmatan lil 'alamin Dalam

hubungan internasionalnya dengan negara lain, KM pada prinsipnya cinta akan kedamaian dan tidak akan melancarkan permusuhan, apalagi peperangan terhadap golongan mana pun, kecuali hanya berkewajiban membela diri dari serangan kelompok atau golongan yang memerangnya. Dalam masalah kewarganegaraan, KM memberikan identitas anggotanya seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dengan sebuah kartu identitas layaknya KTP dengan cara mendaftarkan diri. Kewarganegaraan dalam sistem KM dibagi menjadi dua: pertama,

adalah Muslim atau Muslimah tanpa diskriminasi rasial, golongan, kebangsaan maupun jabatan dan berkewajiban menyerahkan infak dan zakatnya ke Baitul Mal KM. Kedua, adalah masyarakat non-Muslim yang mendambakan keadilan dan kesejahteraan umat serta bersedia patuh terhadap khalifah atau amirul mukminin sepanjang tidak bertentangan dengan agama yang diyakininya, dan rela menyerahkan sumbangan menurut kemampuannya ke Baitul Mal KM demi kesejahteraan bersama lahir batin.

Laiknya pemerintahan pada umumnya, mereka juga memiliki struktur yang menopang kekhilafahan mereka. Struktur pemerintahan tertinggi adalah Khalifah atau Amirul mukminin, yakni Abdul Qadir Baraja. Ia menetap di Lampung, sebagai pusat pemerintahan. Struktur di bawahnya terdapat Katib al-Khilafah (wakil atau sekretaris khalifah). Ia bertugas membantu menjalankan pemerintahan manakala khalifah tidak berada di pusat pemerintahan. Meski keduanya merupakan pelaksana tugas tertinggi dalam struktur pemerintahan, namun di

atasnya terdapat sebuah dewan yang disebut mustasyar (penasehat), yang setara dengan wilayatul faqih di Iran. Merekalah yang berwenang memberi masukan, saran kepada khalifah terhadap masalah umat yang perlu dipecahkan. Tepat di bawah khalifah adalah wazir (menteri) yang membantu khalifah dalam bidang-bidang yang telah ditentukan. Mereka diangkat oleh khalifah. Jumlah menteri merupakan hak mutlak khalifah dan disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat Muslim.²³

Teori Tekstualis dan Kontekstualis Andi Faisal Bakti

Tekstualis dan kontekstualis adalah bagian dari rangkaian teori yang dicetuskan oleh Andi Faisal Bakti dalam rumpun dan pendekatan Komunikasi Antaragama dan Budaya. Dalam hal ini komunikasi antarbudayalah yang lebih dominan menjadi pendekatan dalam menganalisis problematika yang ada. Dilihat dari Nahdhatul Ulama dan Khilafatul Muslimin yang merupakan sebuah produk budaya juga sebetulnya produk agama, akan tetapi dalam urusan lintas keagamaan bukan sesuatu yang pas untuk diperbandingkan karena masih dalam lintasan dan lingkup yang sama, barangkali hanya pemahaman keagamaan atau politik keagamannya saja yang berbeda dan dalam hemat penulis secara khusus tidak bisa didekati oleh komunikasi antaragama namun secara umum jika yang mendekati adalah komunikasi antaragama dan antarbudaya, maka antarbudaya bisa menjadi dominan dalam menganalisisnya dan punya ruang untuk itu.

Ketika seorang individu mulai bergabung dalam kehidupan dengan masyarakat, maka nilai-nilai budaya

sudah mulai diadopsi dalam kehidupannya. Nilai-nilai dan norma-norma yang diyakininya diperoleh dari nilai-nilai dan norma-norma yang dianut masyarakat di mana dia tinggal dan dibesarkan. Proses penyerapan itu diperolehnya lewat sebuah situasi komunikasi. Budaya yang telah berakar dalam diri seorang individu merupakan hasil dari proses komunikasi. Budaya dan komunikasi adalah dua hal yang tidak bisa terpisahkan seperti kata Edward T. Hall bahwa komunikasi adalah salah satu dimensi yang paling penting dan budaya adalah komunikasi sementara komunikasi adalah budaya. Artinya antara komunikasi dan kebudayaan adalah dua hal yang saling berkait. Selanjutnya Sihabuddin menyampaikan bahwa cara kita berkomunikasi sebagian besar dipengaruhi oleh kultur, orang-orang dari kultur yang berbeda akan berkomunikasi secara berbeda. Artinya, budaya dan komunikasi tidak dapat dipisahkan karena tidak hanya memustuskan siapa, tentang apa dan bagaimana komunikasi berlangsung, tetapi budaya juga turut menentukan bagaimana orang menyadari pesan, makna yang dimiliki untuk pesan dan kondisi-kondisi dalam mengirim, memperhatikan dan menafsirkan pesan. Sebenarnya, seluruh perbendaharaan perilaku kita sangat tergantung pada budaya di mana seseorang dibesarkan. Selanjutnya Sihabuddin menyatakan bahwa budaya merupakan landasan komunikasi. Bila budaya beraneka ragam, maka beragam pula praktik-praktik komunikasi.²⁴ Komunikasi antarbudaya didefinisikan sebagai situasi komunikasi antara individu-individu atau kelompok yang memiliki asal-usul bahasa dan budaya yang berbeda. Ini berasal dari definisi

dasar berikut bahwa komunikasi adalah hubungan aktif yang dibangun antara orang melalui bahasa dan sarana antarbudaya. Adanya hubungan yang komunikatif antara orang-orang dari budaya yang berbeda, di mana budaya merupakan manifestasi terstruktur perilaku manusia dalam kehidupan sosial dalam nasional spesifik dan konteks lokal, misalnya politik, linguistik, ekonomi, kelembagaan dan professional maka komunikasi antarbudaya juga didefinisikan sebagai proses pertukaran simbolis di mana individu dari dua (atau lebih) komunitas budaya yang berbeda menegosiasikan makna bersama dalam situasi interaktif. Ada yang memerlukan empat unsur yakni dua orang (atau dua kelompok), dari budaya yang berbeda, dalam interaksi, dan yang menegosiasikan makna umum. Unsur yang keempat menggarisbawahi pentingnya tidak hanya mencoba berkomunikasi tetapi juga untuk memahami, hal ini terasa lebih sulit dan rumit. Sedangkan definisi komunikasi antarbudaya menurut Gudykuns adalah *intercultural communication involves communication between people from different cultures.*²⁵ Komunikasi antarbudaya melibatkan komunikasi antara orang-orang dari budaya yang berbeda. Larry A. Samovar menggambarkan situasi komunikasi antarbudaya adalah *intercultural communication occurs whenever a person from one culture sends a message to be processed by a person from a different culture.* Komunikasi antarbudaya terjadi setiap kali seseorang dari satu budaya mengirimkan pesan untuk diproses oleh orang dari budaya yang berbeda. Selanjutnya Komunikasi antarbudaya menurut Applegate and Sypher menjelaskan bahwa logika komunikasi

dan budaya yang berbeda menekankan tujuan yang berbeda dan cara untuk mencapai tujuan tersebut.²⁶ Secara umum dijelaskan bahwa komunikasi antarbudaya beririsan dengan banyaknya keterlibatan pelaku komunikasi dalam lintas budaya, semacam ada cakupan yang lebih luas dan beragam dari komunikasi lainnya dan lebih kompleks sebab banyak standar dan atribut budaya yang terbawa dalam komunikasi ini.

Sementara teori textualist dan contextualist sendiri adalah —untuk tektualis—pemahaman sekelompok masyarakat, agama dan budaya yang percaya bahwa teks sebagai suatu kebenaran mutlak, artinya teks yang berkata-kata atau berbicara. Tekslah yang mendeterminasi terhadap realita dan punya kekuatan untuk itu, teks tidak boleh tunduk pada konteks sementara konteks atau realita harus tunduk terhadap teks. Sementara kontekstualis adalah kebalikannya yakni sekelompok masyarakat, agama dan budaya yang beranggapan bahwa pemahaman terhadap suatu teks dilihat dari konteks yang ada, tidak bisa teks

dilihat begitu saja secara harfiah tanpa bangunan lain yang menyusunnya. Akan tidak sampai terhadap makna-makna yang hendak dituju jika melihat teks telanjang begitu saja. Sebagai jalan tengahnya yang mempertemukan dua kutub ini, Andi faisal Bakti menyatakan bahwa at-tafsir adalah yang paling tepat menjawabnya.²⁷

Kemudian soal at-tafsir sendiri atau tafsir secara ontologis sebetulnya sudah dijelaskan dengan komprehensif dalam kajian 'ulum Al-Qur'an ulum at-tafsir. Sebagai contoh meminjam uraian dalam kitab Mabahits fi 'Ulum Al-Qur'an, Syaikh Manna al-Qaththan mendefinisikan tafsir secara

terminologi berangkat dari wazan tafil yang berarti menjelaskan, menyingkap dan menjelaskan makna-makna yang ma'qul atau rasional. Kata kerjanya ikut terhadap wazan fa'ala-yafulu dan fa'ala-yafilu dengan mashdar lafaz fasran dengan makna abanahu atau menjelaskan. Baik at-tafsîr maupun al-fasr mempunyai arti menjelaskan dan menyingkap yang tertutup. Lebih lanjut keterangan dalam kitab tersebut melanjutkan nukilan dari Lisan al-'Arab, bahwa al-fasr bermakna menyingkap sesuatu yang tertutup dan at-tafsîr bermakna menyingkap maksud suatu lafaz yang sulit atau musykil serta pendapat-pendapat etimologis lainnya tentang tafsir dan derivasinya.²⁸

Komunikasi Antar Kelompok Nahdhatul Ulama dan Khilafatul Muslimin Perspektif Tekstualis dan Kontekstualis

Subpembahasan yang paling penting ini akan dimulai dari empat tahapan perkembangan kelompok³⁰ yang amat beririsan dengan situasi komunikasi dalam kelompok itu sendiri. Pada bagian ini akan peneliti lihat kematangan masing-masing kelompok yang mewakili kelompok arus utama dan sempalan dalam mengatur

Ini hanya beberapa definisi dari tafsir atau ilmu tafsir dari kitab ulûm Al-Qur'ân dari begitu banyaknya konsep definisi tafsir di berbagai rujukan dan literatur. Pengertian menurut az-Zarkasyi dan z-Zarqani ini penulis anggap yang paling representatif sebab simpel namun mengandung kseleuruhan maksud yang ingin dicapai dalam sebuah formula definisi tafsir. dinamika yang terjadi di kelompoknya masing-masing. Paling awal adalah forming yakni tahapan yang para

anggota mulai menempatkan diri berhubungan secara interpersonal, mereka saling memperhatikan, bersahabat, dan mencoba melihat manfaat serta biaya menjadi anggota kelompok. Baik NU maupun KM keduanya sudah terlampau jauh melewati tahapan yang satu ini pembentukan dan penempatan diri masing-masing anggota sudah tidak perlu diragukan lagi. NU sebagai ormas Islam terbesar di Indonesia atau bahkan dunia pastilah membuka ruang interaksi interpersonal di dalam lingkup sekat kelompoknya. Maka di dalamnya pasti terjadi kontak dan sentuhan yang saling memperhatikan, mengikat dan mulai mengambil manfaat satu dengan yang lainnya.

Pun dengan KM, keanggotaannya yang mulai merambah ke seantero negeri dengan belasan bahkan puluhan ribu anggota menandakan bahwa organisasi ini bukan lagi sebuah embrio ideologis tapi nyata dan hadir dengan gerakannya di tengah-tengah masyarakat kita. Tentunya sama mereka juga saling memperhatikan, mengikat diri dan tentunya mulai berpikir atau sudah melewati tahap saling mengambil keuntungan. Itulah gambaran sedikit tentang masa forming atau peramuhan dasar dari dinamika komunikasi dalam kelompok.

Storming menjadi tahap kelanjutan dari dinamika komunikasi kelompok, tahap ini mulai banyak kegiatan dan pembentukan norma, konflik mulai terjadi karena masalah kepemimpinan, tujuan, norma atau perilaku interpersonal, namun konflik belum tentu terjadi manakala kelompok dapat bekerja efektif dan mampu mengatasi problem. Sebagai organisasi besar seperti NU badai-badai yang menggoyangkan pelayaran organisasi

atau kelompok pasti tak pernah padam datang silih berganti. Dinamika pergantian pemimpin dari masa ke masa pada waktunya akan menimbulkan gesekan baik kecil maupun besar dalam kelompok dan itu tidak bisa ditolak begitu saja, sebab sudah menjadi bagian dari dinamika kelompok. Demikian pun dengan KM yang sejak awal terjadi kebingungan siapa sebetulnya yang berhak memimpin KM sebab KM tidak seperti organisasi penyokong kekhilafahan lainnya. KM membawa misi global makan pemimpinnya pun —dalam pandangan mereka— harus pemimpin internasional sebab yang dicakup adalah kawasan sedunia, kekhilafahan internasional bukan proyek negara Islam seperti para pendahulunya yang lalu. Maka pada akhirnya badai yang dimunculkan itu dikembalikan lagi pada pencetusnya, Abdul Qodir Baraja didaulat menjadi amir tertinggi di KM, Abdul Qodir Baraja sendiri yang mengeluarkan maklumat tentang pendirian khalifah maka mau tidak mau keadaan juga yang memaksa Ia menjawab maklumatnya sendiri.

Tahapan selanjutnya yakni norming, tahap ketiga ini anggota kelompok belajar bekerjasama, mengembangkan norma dan kekompakan. Kerjasama dan rasa tanggung jawab berkembang pada tahap ini. Usia NU yang hampir satu abad rasanya cukup mengatakan bahwa kelompok atau organisasi ini matang lahir batin. Norma-norma sudah terbentuk secara paten dan terupdate selama lima tahun sekali dengan proses panjang Mukhtar sebagai majlis tertinggi NU dalam memutuskan problem keorganisasian maupun problem di luar itu baik masalah-masalah hukum keislaman kontemporer hingga pandangan politik keagamaan. Tema besar makalah ini

soal pemahaman politik keagamaan juga nampaknya bisa lahir dalam tahapan yang ketiga ini atau norming, ke mana arah kelompok ditentukan, afiliasi, paradigma berpikir, tujuan dasar dan kesemua yang berkaitan dengan cara pandang ditentukan dalam proses ini. Maka baik NU maupun KM sudah menentukan jalannya masing-masing. Pemahaman politik keagamaan NU yang cenderung moderat ataupun KM yang cenderung ke kanan dalam ihwal haluan pemahaman politik keagamaan. Pada hakikatnya ini semua hasil buah pemikiran dan perenungan masing-masing dalam melihat dunia ini dengan kacamata masing-masing, maka teori lintas budaya yang dikemukakan Andi Faisal Bakti tadi digadang mampu menengahi dua kutub haluan berpikir tersebut.

Tahap terakhir adalah performing, tahap ini kerjasama yang efektif dalam menjalankan tugas. Dari tahap ini beberapa kelompok dapat terus berkembang, ada pula yang kemudian mengalami kemunduran. Tahap ini menjangkau area eksekusi dan keterus-menerusan memelihara apa-apa yang sudah dirumuskan di tahap sebelumnya. Jika teori tidak berjalan lurus dengan eksekusi makan cita-cita kelompok hanya mimpi di siang bolong. Atau seperti arah jalan KM yang dinilai akhir-akhir ini bertentangan dengan logika berpikir dan logika hukum yang ada, maka performa yang ditampilkan hanya akan membuat lelah diri sendiri dan berakhir pada perseteruan dengan kelompok utama atau bahkan penegak hukum. Terbukti para pentolan hingga pemimpi tertingginya kini diamankan oleh kepolisian sebab pandangan dan tindakannya yang bersebrangan dengan ideologi Pancasila sebagai asas hidup yang paling mendasar bagi bangsa ini.

Sementara NU dalam pola geraknya yang selalu berbanding lurus dengan logika Pancasila atau asas dasar kehidupan berbangsa dan benegara, maka langkah kakinya akan aman-aman saja dalam meneruskan cita-cita kelompok maupun cita-cita bangsa.

Selanjutnya soal tektualis dan kontekstualis, peneliti menempatkan KM sebagai kelompok dengan acuan tektualis dalam membaca naskah-naskah keagamaan sedangkan kontekstualis diisi oleh NU yang sangat membuka ruang dialog antara naskah keagamaan dengan realitas sosial yang ada baik dulu maupun masa-masa kini. Tektualis atau pemahaman sekelompok masyarakat, agama dan budaya yang percaya bahwa teks sebagai suatu kebenaran mutlak, artinya teks yang berkata-kata atau berbicara. Tekslah yang mendeterminasi terhadap realita dan punya kekuatan untuk itu, teks tidak boleh tunduk pada konteks sementara konteks atau realita harus tunduk terhadap teks. Kriteria ini sangat mencukupi KM dalam membangun bangunan berpikirnya. Sementara kontekstualis adalah kebalikannya yakni sekelompok masyarakat, agama dan budaya yang beranggapan bahwa pemahaman terhadap suatu teks dilihat dari konteks yang ada, tidak bisa teks dilihat begitu saja secara harfiah tanpa bangunan lain yang menyusunnya. Akan tidak sampai terhadap makna-makna yang hendak dituju jika melihat teks telanjang begitu saja. NU dengan kemoderatannya dan dialognya terhadap realita maupun naskah-naskah agama maka cocok ditempatkan sebagai kelompok yang mengusung pemahaman kontekstualis yang melihat nash Al-Qur'an maupun Hadits dengan lebih proporsional dan

mempertimbangkan aspek-aspek realita kemasyarakatan.

Contoh pemahaman tekstual yang dikedepankan kelompok sempalan seperti KM misal soal sebuah ayat surat An-Nisa ayat 59 tentang taat kepada ulil amri:

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Dalam berbagai literatur menjelaskan tentang penafsiran para pentolan KM yang menyatakan bahwa tidak ada pemerintahan negara Islam apalagi pemerintahan negara, yang ada hanyalah satu kepemimpinan global tanpa sekat teritori dan geografis seperti negara. Kepemimpinan yang sesuai dengan ayat Al-Qur'an di atas tadi, setelah kepatuhan kepada Allah, dan RasulNya maka pemimpin harus ditaati.

Pemimpin di sini atau ulil amri yang secara bahasa bermakna pemegang kekuasaan dialah orang satu-satunya yang diberikan mandat mengelola kepemimpinan besar umat Islam atau yang lumrah disebut Khilafah, sebab pascakepemimpinan Rasul, Khulafa'ur Rasyidin dan para dinasti hingga terakhir Utsmani, estafet kepemimpinan ini harus berlanjut terus hingga hari kiamat. Maka, makna patuh kepada pemimpin dalam ayat tersebut adalah pemimpin dalam artian amir dalam sebuah sistem kekhilafahan global. Jika hanya pemimpin negara apalagi ke bawahnya, yang demikian belum masuk kategori

sebagai ulil amri yang dikehendaki oleh Allah melalui Al-Qur'an.

Berbeda dengan yang diindikasikan dan dinarasikan oleh kelompok arus utama seperti NU. NU dan umat Islam kebanyakan melihat bahwa ulil amri tidaklah leterlek harus seorang pemimpin global seperti yang dinarasikan oleh KM. pada tafsir kemenag saja misalkan, siapa saja yang membuat dan menetapkan aturan hukum terhadap masyarakat selama sesuai dengan perintah Allah dan Rasul maka dapat dikatakan yang demikian adalah ulil amri dan wajib dipatuhi.³¹ Pemikiran demikian tidak lahir begitu saja, pastilah melewati perenungan panjang dengan mendudukkan teks dengan konteks yang ada. Apalagi jika dikembalikan dalam konteks keindonesiaan walaupun secara redaksional bukanlah negara Islam akan tetapi dari ujung ke ujung konsep-konsep syariat keislaman digunakan dalam tatanan berbangsa dan bernegara, pun yang ikhtiar yang dilakukan pemerintah adalah semata-mata demi kemaslahatan umat dan sesuai dengan koridor cita-cita luhur bangsa yang landasan dasarnya adalah ketuhanan. Muatan syariat jika dilihat lebih eksplisit diakomodir dengan berbagai undang-undang dan turunannya yang sangat memudahkan umat Islam, bagaimana negara mengatur UU Perkawinan, Haji, Zakat, Wakaf, Pesantren dan lainnya, maka tidak ada alasan untuk tidak mematuhi ulil amri dengan model demikian.

Pasti tentulah dua kutub ini tidak akan bisa ditentukan, komunikasi dan diskusipun pada ujungnya akan mengakibatkan dead lock sebab masing-masing membawa pemahamannya sendiri dan tekstualis dengan kontekstualis adalah dua hal yang bersebrangan cukup jauh. Andi

Faisal Bakti membawa jalan tengah at-tafsir untuk sedikit mengurangi ketegangan antara dua kelompok ini.³²

Peneliti melihat bahwa urgensi at-tafsir adalah bukan soal menafsirkan akan tetapi membaca lebih banyak penafsiran para ulama mulai dari zaman klasik hingga modern, mulai dari para penafsir riwayat dengan penafsir dirayah yang kesemuanya jika diakomodasi dalam satu pikiran dingin pastilah ditemukan celah-celah yang kemudian bisa mengompromikan dua kutub apapun yang bersebrangan. Sederhananya, lebih banyak membaca dan merenungi, membuka kitab dan membaca buku, mendengarkan orang lain dan menyimak sesama. Agar yang menjadi bangunan pemikiran kita bukan lahir semata dari hawa nafsu dan ego yang ada dalam diri kita, sehingga seolah yang menjadi bunyi teks dari nash agama adalah kita yang paling memahaminya.

Sebagai contoh jika kita mengembalikan kepada penafsiran para ulama, di Tafsir al-Mishbah saja. M. Quraish Shihab banyak memberikan alternatif penafsiran soal ulil amri yang begitu luwes dan mengakomodir para mufasir terdahulu maupun kekinian. Semisal M. Quraish Shihab menyebut bahwa ulil amri adalah mereka para penguasa atau pemerintah, ada juga yang mengatakan sebagai ulama sebab dari akar katanya uli yang merupakan jamak dari kata waliyun yang artinya pemilik, pengurus atau yang menguasai dan amr yang bermakna urusan atau perintah. Artinya ulil amri adalah orang yang berwenang mengurus kepentingan orang Muslim dan bisa diandalkan dalam menangani persoalan-persoalan kemasyarakatan.³³

Makna ini luas dan menjadi kemudahan tersendiri untuk kita memaknainya dan disesuaikan dengan

konteks yang ada di masyarakat kita. Ada juga ulama seperti Rasyid Ridha dan Muhammad Abduh yang menyebut bahwa kata uli yang digunakan sebagai jamak bermakna bahwa ulil amri adalah sebuah kelompok tertentu yakni suatu badan atau lembaga yang punya wewenang menetapkan dan membatalkan sesuatu misal dalam hal pengangkatan kepala negara, pembentukan undang-undang dan instrument hukum lainnya yang dinamai *ahlul halli wal 'aqdi* yang merupakan pemuka masyarakat dari berbagai disiplin bidang. Bahkan M. Quraish Shihab sendiri menyatakan bahwa ayat ini mengisyaratkan bahwa hendaknya umat Islam mewujudkan lembaga yang dapat mengatur urusan mereka seperti eksekutif, yudikatif dan legislatif.

Agaknya menjadi legalah kita setelah melihat jalan tengah at-tafsir yang jika kita buka semua penafsiran akan ditemukan berbagai alternatif penangkapan pemahaman terhadap suatu teks keagamaan yang pada akhirnya akan membuat pemikiran kita luas dan tidak kaku terhadap teks yang terkadang pada hakikatnya adalah hasil produk nafsu kita sendiri. Sebagai penutup peneliti ingat sebuah kalimat sederhana dari Sayyid Alwi al-Maliki yang menyatakan bahwa semakin bertambah pemahaman seseorang dan meluas pemikirannya maka akan semakin sedikit menyalahkan orang lain.

Penutup

Upaya komunikasi kelompok yang disusun oleh kedua kelompok yang diwakili oleh Nahdhatul Ulama sebagai kelompok arus utama dan Khilafatul Muslimin sebagai kelompok sempalan agaknya sudah melewati kesemua tahapan-tahapan yang ada

dalam dinamika kelompok. Proses yang paling menentukan dan membedakan adalah norming dan performing. Penentuan terhadap norma serta cara-cara pandang dalam melihat norma-norma agama melalui teks yang ada disikapi berbeda oleh masing-masing kelompok sehingga lahir pemikiran khas dari masing-masing yang seolah bersebrangan. Memang bersebrangan, tapi peneliti melihat ini adalah masalah di mana masing-masing berdiri dan mengambil tempat dalam melihat teks-teks agama, dan itu semua sudah dilakukan oleh kedua kelompok. Termasuk dalam mengeksekusi masing-masing hasil penggodokkan di tahap tiga tadi. Dikarenakan cara pandang yang berbeda atau berada di luar arus utama maka yang demikian bagi KM sulit mengembangkan diri karena banyak bertentangan dengan logika dasar dan logika umum yang dianut khususnya di negara kita.

At-Tafsir juga cukup komprehensif sebagai jalan tengah yang ditawarkan Andi Faisal Bakti yang dapat membuka mata kita bahwa banyak sesungguhnya alternatif penafsiran yang dapat kita gunakan dalam mengeksplorasi keagamaan. Ini rasanya yang ke depan perlu dilakukan oleh kedua kelompok agar bisa bertemu tanpa bosan untuk sama-sama membaca kembali dan belajar bersama maka akan banyak hal baru yang ditemukan dan memperluas jangkauan cakrawala pemikiran kita.

Daftar Pustaka

² Badru Alarna. NU, Kritisisme dan Pergeseran Makna Aswaja. (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000), Hal.77

³<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220607113343-12-805776/pemimpin-khilafatul->

- ⁴ Elvinaro Ardianto dan BQ. Anees. Filsafat Ilmu Komunikasi, (Bandung SR Media, 2007), hal.158
- ⁵ Winanrno. Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik, (Bandung: Tarsito, 1989),
- ⁶ Robert K Yin. Studi Kasus, Desain dan Metode, (Bandung: Raja Grafindo, 2013), hal.5
- ⁷ Burhan Bungin. Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat, (Jakarta: Prenada Media, 2014), hal. 43
- ⁸ Deddy Mulyana. Ilmu Komunikasi, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005)
- ⁹ Ririn Puspita Tutiasari. "Komunikasi dalam Komunikasi Kelompok" dalam Jurnal Channel. Vol. 4, No. 1. (Yogyakarta: Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Ahmad Dahlan, 2006), hal. 83
- ¹⁰ Werner J Severin dan James W Tankard Jr. Teori Komunikasi: Sejarah, Metode dan Terapan di Dalam Media Massa. (Jakarta: Prenada Media Goup, 2014), hal. 219, terj. Communication Theories: Origins, Methods & Uses in the Mass Media
- ¹¹ Morissan. Teori Komunikasi Individu hingga Massa. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hal.
- ¹² Ririn Puspita Tutiasari. "Komunikasi dalam Komunikasi Kelompok" dalam Jurnal Channel. Vol. 4, No. 1.(Yogyakarta: Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Ahmad Dahlan, 2006), hal. 83
- ¹³ Sahilun A. Nasir, Pemikiran Kalam (Teologi Islam): Sejarah, Ajaran dan Perkembangannya (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hal. 190.
- ¹⁴ Zuhairi Misrawi. Hadratussyaikh Hasyim Asy'ari: Moderasi,

- Keumatan dan Kebangsaan. (Jakarta: Kompas, 2010), hal. 87
- ¹⁵ Maskuri Bakri. "Respon Nahdlatul Ulama terhadap Gempuran Aliran Fundamental: Telaah Kritis Radikalisme Intoleran dan Pudarnya Moderatisme Islam" dalam Jurnal Pemikiran Islami Vol. 32 No.1 (Kediri: Universitas Tribakti, 2021), hal. 18-20
- ¹⁶ <https://www.nu.or.id/static/6/sejarah-nu> diakses pada 21 Juli 2022, pukul 06.15
- ¹⁷ Thollhah Hasan. Ahlussunnah Wal Jama'ah dalam Persepsi dan Tradisi NU. (Jakarta: Lantabora Press, 2015), hal. xi
- ¹⁸ Masih dalam pemahaman para pendirinya.
- ¹⁹ Sukri Abubakar dan Irwan Suriadin. "Pola Gerakan dan Arah Pendidikan Khilafatul Muslimin diBima", dalam Jurnal Fitrah Vol. 10 No.2. (Studi Pendidikan Islam, 2019), hal5-8
- ²⁰ <https://www.khilafatulmusliminbgr.wordpress.com>
- ²⁰ <https://www.khilafatulmusliminbgr.wordpress.com> diakses pada 21 Juli 2022 pukul 16.23
- ²¹ <https://www.populis.id> diakses pada 21 Juli 2022 pukul 21.03
- ²² Abdul Muchith Muzadi. Mengenal Nahdhatul Ulama. (Surabaya: Calista, 2006), hal. 28-30